

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM TENTANG PENEGAKKAN HAK TERHADAP MANUSIA DI INDONESIA

Faturohman¹, Ridwan Maulana², Idha Andini³

arturcikaseban@gmail.com¹, ridwanmaulanatj@gmail.com², idhaandini23477@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

Abstrak

Penegakkan suatu hak terhadap manusia di Indonesia, ini merupakan isu yang kompleks dan juga multidimensional, yang dapat melibatkan aspek sosial, dan lain sebagainya. Indonesia ini memiliki suatu kerangka bagi hukum yang relatif kuat, untuk melindungi hak terhadap manusia, termasuk suatu perundang-undangan. Ada beberapa institusi yang berperan sangat penting dalam penegakkan hak terhadap manusia, seperti komisi yang membahas tentang hak terhadap manusia. Meski begitu, adanya suatu efektivitas institusi-institusi ini sering sekali dapat memperlambat di berbagai faktor seperti korupsi. Adanya sebuah tantangan dalam penegakkan hak terhadap manusia, yang ada di Indonesia ini mencakup adanya suatu ketidakadilan dalam sistem peradilan dan juga adanya keterbatasan akses terhadap suatu keadilan bagi kelompok. Banyaknya suatu organisasi yang terkait dalam kasus ini, Indonesia terlibat di dalam berbagai suatu hak terhadap manusia di Internasional. Meskipun adanya suatu langkah-langkah yang positif dalam penegakkan hak terhadap manusia di Indonesia, dan juga masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengtassi berbagai tantangan dan juga dapat memastikan adanya perlindungan yang sangat efektif bagi semua warga negara.

Kata Kunci : Perlindungan, hak, tantangan.

Abstract

Enforcement of human rights in Indonesia is a complex and multidimensional issue, which can involve social aspects, and so on. Indonesia has a relatively strong legal framework to protect human rights, including legislation. There are several institutions that play a very important role in upholding human rights, such as commissions that discuss human rights. However, the effectiveness of these institutions can often hamper various factors such as corruption. There are challenges in upholding human rights, which in Indonesia include injustice in the justice system and also limited access to justice for groups. There are many organizations involved in this case, Indonesia is involved in various international human rights issues. Although there have been positive steps in upholding human rights in Indonesia, there is still a lot of work that needs to be done to overcome various challenges and also ensure that there is highly effective protection for all citizens.

Keywords: Protection, rights, challenges.

PENDAHULUAN

Hak terhadap manusia, ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia ini tanpa harus memandang ras dan lain sebagainya. Adanya pengakuan dan juga suatu perlindungan hak terhadap landasan yang penting bagi terciptanya masyarakat yang dilakukan secara seadil mungkin. Di Indonesia, memiliki suatu komitmen terhadap penegakkan hak terhadap manusia secara tercermin di dalam instrument hukum, Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memajukan hak yang dimiliki oleh manusia.

Adanya perundang-undangan yang mengatur tentang hak terhadap manusia, bukan hanya itu adanya konvensi antar internasional tentang hak yang dimiliki oleh politik. Ini, memiliki tujuan guna :

1. Adanya suatu kerangka hukum yang dilakukan oleh nasional dan internasional yang mengatur tentang hak terhadap manusia yang ada di Indonesia.

2. Adanya sebuah institusi dan mekanisme penegakkan hak terhadap manusia.
3. Adanya sebuah tantangan dan juga hambatan dalam penegakkan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia.
4. Studi kasus tentang penegakkan hak terhadap manusia yang ada di Indonesia.

Penegakkan hak terhadap manusia yang ada di Indonesia, ini merupakan suatu proses yang kompleks dan juga dapat melibatkan berbagai aspek hukum dan juga mekanisme pengawasan dan juga implementasi. Indonesia telah meratifikasi beberapa, adanya kovenan ini dapat memastikan suatu hak yang dimiliki oleh hak politik, ini dapat menentang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Adanya suatu lembaga yang terkait, guna melindungi hak yang dimiliki oleh manusia yang ada di Indonesia. Adanya komisi yang membahas tentang hak pada manusia ini memiliki suatu kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

Adanya suatu pengadilan ini berwenang menangani kasus-kasus pelanggaran hak terhadap manusia yang sangat berat, adanya suatu lembaga ini dapat memberikan suatu perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh manusia. Komisi pada hak yang dimiliki oleh manusia ini melakukan suatu penyelidikan, terhadap dugaan yang dilakukan oleh pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh manusia, baik secara proaktif maupun atas aduan masyarakat.

Kasus pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia ini dapat diproses, dengan melalui suatu pengadilan pada hak yang dimiliki oleh manusia. Proses ini dapat melibatkan suatu penyelidikan, Indonesia ini wajib menyampaikan laporan yang berkala tentang implementasi kovenan dan konvensi hak terhadap manusia yang sangat diratifikasi suatu badan bagi pengawasan yang dilakukan di internasional. Terdapat adanya suatu hambatan dalam penegakkan hukum, seperti kurangnya sumber daya, birokrasi yang kompleks, dan sistem peradilan yang kurang efektif.

Lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakkan hak terhadap manusia ini, sering sekali menghadapi suatu keterbatasan pada sumber daya manusia dan juga adanya finansial yang dapat menghambat efektivitas mereka. Masih ada budaya impunitas dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak terhadap manusia. Penegakkan hak terhadap manusia ini sering sekali, menjadi hambatan oleh tekanan politik dan kepentingan tertentu yang menghalangi proses hukum yang adil dan transparan.

Penegakan yang dilakukan oleh hak yang dimiliki oleh manusia ini memerlukan suatu upaya yang sangat berkelanjutan dan juga dapat komitmen, dari semua pihak yang terkait. Adanya rekomendasi, guna memperkuat penegakkan hak terhadap manusia di Indonesia, ialah :

1. Memperkuat kapasitas dan independensi lembaga penegakkan hak terhadap manusia, seperti kegiatan pelatihan
2. Reformasi sistem peradilan untuk memastikan proses hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak memihak.
3. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak yang dimiliki oleh manusia
4. Meningkatkan kerjasama dengan komunitas-komunitas internasional untuk berbagi pengalaman, guna menyelesaikan kasus ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis, ialah adanya pembahasan yang membahas tentang suatu gambaran terhadap hukum, secara detail. Penelitian ini sudah di atur di dalam suatu pengaturan perundang-undangan, yang telah ditentukan dan diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh globalisasi terhadap penegakkan hak terhadap manusia

Globalisasi ialah adanya masuknya dan juga meluasnya suatu pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan di dunia. . Pengaruh globalisasi terhadap penegakkan hak yang dimiliki oleh manusia, yang ada di Indonesia memiliki berbagai dimensi baik bersifat positif maupun negative. Adanya globalisasi ini membawa dampak yang signifikan dalam konteks, penegakkan hak terhadap manusia dan juga tantantang dalam konteks global sangat kompleks, ada beberapa pengaruh dan juga tantangan ialah :

1. Globalisasi informasi melalui internet dan media sosial memungkinkan penyebaran informasi mengenai hak terhadap manusia, lebih luas dan juga cepat.
2. Organisasi internasional seperti lembaga yang terkait, ini dapat memberikan suatu tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki praktik penegakkan hak terhadap manusia
3. Globalisasi membuka peluang bagi Indonesia untuk bekerjasama dengan negara lain dan juga organisasi internasional dalam upaya penegakkan hak terhadap manusia
4. Adopsi standar hak terhadap manusia yang dilakukan secara internasional, dapat mempengaruhi suatu pembentukan kebijakan nasional dan reformasi hukum di Indonesia, ini dapat mendorong negara untuk menyesuaikan suatu peraturan domestik sesuai dengan konvensi dan traktat internasional.
5. Globalisasi ekonomi dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam di Indonesia, yang seringkali disertai pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh manusia.
6. Ketimpangan ekonomi yang dapat diperparah oleh globalisasi dapat memperburuk kondisi sosial.
7. Dominasi budaya global dapat mengancam identitas dan budaya lokal, yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan kelompok minoritas.

Adanya sebuah tantangan di dalam konteks global, yang dimiliki oleh suatu negara Indonesia, ialah :

1. Ada ketegangan antara kedaulatan nasional dan intervensi internasional.
2. Tantangan dalam mengintegrasikan standar hak terhadap manusia, secara internasional dengan nilai budaya dalam lokal dan juga adanya sistem hukum yang berbeda
3. Adanya suatu perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia sering kali mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan hak-hak pekerja dan masyarakat lokal.
4. Adanya suatu isu keamanan global dan perang melawan terorisme dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran hak terhadap manusia.
5. Globalisasi juga dapat membawa tantangan terkait perubahan iklim yang berdampak pada hak-hak lingkungan
6. Isu migrasi global dan juga adanya pengungsi menambah tantangan bagi Indonesia dalam menangani hak-hak migran dan pengungsi yang sering kali berada dalam kondisi rentan dan tanpa perlindungan yang memadai.

Pengaruh globalisasi terhadap penegakkan terhadap hak pada manusia ini, dapat dilihat dari berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Ada beberapa dampak utama dalam globalisasi, terhadap penegakkan hak pada manusia :

1. Dampak positifnya ialah, adanya globalisasi informasi memungkinkan akses lebih luas terhadap pengetahuan dan pendidikan tentang hak terhadap manusia.
2. Dampak positifnya ialah, suatu negara dan organisasi internasional dapat memberikan

tekanan terhadap pemerintah yang melanggar hak terhadap manusia guna memperbaiki suatu kebijakan.

3. Dampak yang ketiga, ialah adanya adopsi konvensi, tentang suatu hak yang ada di manusia.
4. Dampak yang keempat, ialah adanya suatu globalisasi dapat mendukung penguatan lembaga-lembaga pada hak yang dimiliki oleh manusia baik nasional dan juga dari organisasi yang dilakukan di internasional
5. Dampak yang kelima, ialah adanya suatu globalisasi ini lah dapat mendorong adanya kerjasama antarnegara dalam penegakan hak terhadap manusia.

Bukan hanya berdampak bagi positif, ada juga dampak negative pada suatu organisasi terhadap penegakkan hak terhadap manusia, ialah :

1. Globalisasi ekonomi sering kali menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
2. Globalisasi dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial, yang berdampak pada pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Aktivitas ekonomi global yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam hak-hak masyarakat lokal terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
4. Dominan budaya global dapat mengancam identitas budaya lokal dan hak-hak budaya masyarakat adat dan minoritas..
5. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan internet, masalah pelanggaran hak-hak digital seperti privasi, keamanan data, dan kebebasan berekspresi juga meningkat.
6. Globalisasi dapat memperumit penegakkan hukum karena pelanggaran hak terhadap manusia, ini sering sekali dapat melibatkan aktor transnasional.

Efektivitas sistem hukum Indonesia

Hak terhadap manusia ini merupakan suatu hak yang sangat melekat pada manusia ini, tanpa adanya mustahil manusia ini dapat hidup sebagai manusia. Efektivitas sistem hukum Indonesia dalam penegakkan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia, ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk kerangka hukum, dan penegakkan hukum. Ada beberapa poin utama dalam mencerminkan suatu efektivitas ialah :

1. Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak yang dimiliki oleh manusia.
2. Komisi yang terkait dalam kasus ini, merupakan suatu lembaga yang memiliki suatu mandat, yang bertujuan untuk memantau, menyelidiki, dan melaporkan pelanggaran hak terhadap manusia.
3. Pengadilan di Indonesia memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hak yang dimiliki oleh manusia.
4. Adanya kementerian dan juga hak yang dimiliki oleh manusia, ini memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan suatu kebijakan dan juga strategi yang terkait dengan hak yang dimiliki oleh manusia

Meskipun terdapat kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup memadai, penegakkan hak yang dimiliki oleh Indonesia, ini dapat menghadapi berbagai kendala yang signifikan, ialah :

1. Korupsi, ini dalam merupakan suatu sistem peradilan dan aparat penegak hukum menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efektif.
2. Banyak lembaga penegak pada hak yang dimiliki oleh manusia, ini dapat memiliki suatu kekurangan sumber daya manusia dan finansial, yang membatasi kapasitas mereka untuk menjalankan mandat secara efektif.
3. Pengaruh politik dalam proses penegakan hukum sering kali menyebabkan kasus-kasus

- pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia
4. Budaya impunitas, di mana pelanggar hak yang dimiliki oleh manusia ini tidak ada di hukum atau ditindak secara tegas
 5. Sistem hukum yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menghambat akses masyarakat terhadap keadilan.
 6. Adanya tingkat kesadaran masyarakat tentang hak pada manusia yang sangat rendah

KESIMPULAN

Penegakkan pada hak yang dimiliki oleh manusia, di Indonesia ini merupakan isu kompleks yang sangat melibatkan berbagai aspek hukum. Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dirancang untuk melindungi hak terhadap manusia, ini termasuk ratifikasi konvensi internasional. Namun, masih pada diperlukan suatu penguatan dalam implementasi dan harmonisasi peraturan tersebut agar lebih efektif. Adanya, lembaga-lembaga yang terkait dengan hak yang dimiliki oleh manusia ini memainkan peran yang sangat penting, dalam penegakkan hak pada manusia. Banyak lembaga penegak hak yang dimiliki oleh manusia, ini ialah adanya aparat hukum yang dapat memiliki suatu kekurangan pada sumber daya manusia dan juga finansial.

Kelompok-kelompok rentan seperti adanya minoritas pada agama, serta adanya penyandang disabilitas ini masih sering mengalami pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh manusia. Perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok ini perlu ditingkatkan, dengan melalui suatu kebijakan yang lebih inklusif dan implementasi yang lebih efektif. Globalisasi dapat membawa dampak positif seperti peningkatan kesadaran pada hak yang dimiliki oleh manusia, dan juga adanya tekanan yang dapat memperbaiki suatu praktik guna penegakkan hak terhadap manusia.

Memperkuat suatu perundang-undangan yang ada dan juga guna memastikan suatu harmonisasi dengan suatu standar internasional, dan juga dapat memberikan suatu dukungan sumber daya dan pelatihan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan hak yang dimiliki oleh manusia, guna meningkatkan kapabilitas. Meningkatkan suatu pendidikan dan juga kesadaran tentang hak pada manusia, ini ada di kalangan masyarakat yang dengan melalui suatu kurikulum sekolah.

Mengembangkan dan juga menerapkan suatu kebijakan yang lebih inklusif untuk melindungi hak-hak kelompok rentan. Memanfaatkan kerjasama internasional untuk mendapatkan bantuan teknis, dukungan finansial, dan tekanan diplomatik dalam upaya guna memperbaiki hak yang dimiliki oleh manusia, yang ada di Indonesia. Globalisasi, dengan berbagai suatu dimensinya, ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penegakkan hak terhadap manusia, di Indonesia. Adanya dampak globalisasi mencakup aspek positif dan negatif, serta menimbulkan berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam konteks global.

1. Akses yang lebih luas terhadap informasi global melalui internet dan media sosial
2. Organisasi-organisasi dan lembaga yang terkait dalam kasus, ini sering sekali memberikan suatu tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penegakan hak terhadap manusia.
3. Globalisasi mendorong Indonesia untuk mengadopsi dan menyesuaikan standar hak yang dimiliki oleh manusia.
4. Adanya suatu globalisasi memfasilitasi kerjasama antarnegara dan lembaga yang terkait, guna mengawasi dan juga melakukan suatu bantuan teknis.
5. Perusahaan multinasional yang dapat beroperasi di Indonesia, ini seringkali memprioritaskan sebuah keuntungan ekonomi dengan mengabaikan hak-hak pekerja, termasuk kondisi kerja yang tidak layak dan upah rendah.

6. Globalisasi dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, mengakibatkan marginalisasi kelompok rentan dan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka.
7. Aktivitas ekonomi global yang tidak berkelanjutan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat lokal, mengancam hak mereka terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.

Globalisasi memiliki dampak yang kompleks terhadap penegakkan hak yang dimiliki oleh manusia, ini dapat membawa manfaat seperti adanya peningkatan akan kesadaran dan dukungan dari komunitas internasional. Dalam konteks global, ini merupakan suatu tantangan yang dihadapi termasuk ketegangan antara kedaulatan nasional dan intervensi internasional, keberagaman budaya dan sistem hukum, serta isu-isu keamanan global dan perubahan iklim.

Untuk mengoptimalkan dampak positif dan mengatasi suatu tantangan ini, dapat diperlukan suatu pendekatan yang holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Upaya tersebut harus diarahkan pada peningkatan kerangka hukum dan kebijakan, penguatan lembaga penegak hak pada manusia, serta adanya peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai hak yang dimiliki oleh manusia.

Efektivitas sistem hukum Indonesia dalam penegakkan yang dimiliki oleh manusia, ini memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, ada beberapa kendala ialah :

1. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk penegakkan hak yang dimiliki oleh manusia
2. Keberadaan institusi seperti adanya komisi pada hak yang dimiliki oleh manusia, dan juga adanya suatu pengadilan khusus yang menangani kasus hak yang dimiliki oleh manusia ini, dapat menunjukkan komitmen negara dalam menangani isu-isu hak asasi manusia.
3. Kesadaran masyarakat tentang hak yang dimiliki oleh manusia ini semakin meningkat, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye publik yang dilakukan oleh berbagai organisasi non-pemerintah dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sajidiman, Djunaedi. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan. (Diktat Pembelajaran). Universitas Suryakencana, Cianjur
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020
- Perundang-undangan.